BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

# Rencana Kerja Tahun 2025

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP








CONVENTION HALL SLG Lt. 2
Jl. Erlangga Kawasan SLG

0354-699372

dlh@kedirikab.go.id

dlh_kabkediri

# PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri dapat menyelesaikan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara substantif Renja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun.

Akhir kata, semoga Renja 2025 dapat berfungsi optimal sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

Kediri, 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kediri

Putut Agung Subekti, S.E., MM.
Pembina Tk. I
Nip. 197106141992031004

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi:

- Transparansi : setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan harus memiliki mekanisme yang jelas dan terukur serta dapat leluasa diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- Akuntabilitas: penyelenggaraan fungsi – fungsi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terukur kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan berdaya guna dan berhasil guna;
- Partisipasi: setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan melibatkan masyarakat/para pemangku kepentingan sebagai pelaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang penyusunannya merepresentasikan tiga pilar utama tersebut. Dalam artian, penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, dengan tetap memperhatikan hasil kinerja yang dicapai sebelumnya, permasalahan yang ada dan isu strategis yang dihadapi.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdasarkan KepMendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan KepMendari 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.

Berdasarkan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, Rencana Kerja tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga periode Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026. Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyuluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri ini adalah untuk menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah, serta menjamin keterpaduan arah kebijakan, strategi dan keselarasan program/kegiatan/subkegiatan agar sesuai dengan sasaran dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja PD setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri adalah menghadirkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dan selaras mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan, terarah dan terpadu secara konsisten agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah di tetapkan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

# BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan RENJA Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta alasan proses tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkaitdengan tugas pokok dan fungsi SKPD

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA SKPD

perumusan tujuan dan sasaran Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugasdan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yangmenjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Menguraikan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana anggaran yang dibutuhkan.

## BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

# BAB II

# HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang memuat perencanaan pembangunan berupa indikator kinerja merupakan panduan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Alokasi anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri Tahun 2023 setelah perubahn APBD sebesar Rp. 38.856.672.944,00 dengan rincian belanja modal sebesar Rp. 8.008.582.264,00 dan belanja operasi sebesar Rp. 30.848.090.680,00 Adapun realiasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sebesar Rp. 37.085.000.794,00 atau 95,44% **melebihi dari target** yang telah ditetapkan sebesar 95%. Dengan hasil tersebur di bawah didapatkan capaian rata-rata realiasasi anggaran program adalah 80,02%. Rincian realiasi belanja pada tahun 2023 adalah belanja modal sebesar Rp. 7.909.816.526,00 dan belanja operasi Rp. 29.175.184.268,00.

Pada tahun 2023 rata-rata capaian program adalah 104,1% dan dapat disimpukan bahwa target program kegiatan pada Dinas lingkungan Hidup pada tahun 2023 telah **tercapai**. Untuk program Pengelolaan Persampahan capaian kinerja hanya 52,49%. Persentase sampah terkelola tidak memenuhi target disebabkan kenaikan jumlah timbulan sampah Kab Kediri yang naik, koefisien (timbulan sampah per orang per hari) yang semula sebesar 0.32 kg/orang/hari naik menjadi 0.4 kg/orang/hari, serta adanya kenaikan jumlah penduduk kab Kediri.

Pada tahun 2024 terjadi perubahan beberapa sub kegiatan yang sangat berpengaruh pada rencana realisasi sub kegiatan. Hal ini karena keluaran sub kegiatan tidak selaras dan sulit dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun program kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dan selaras dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan sebagai berikut :

## Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

**SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri**

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| X XX 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100,00% |
| X XX 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dok. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | 30 dokumen | | 10 dokumen | 10 dokumen | 100% | 10 dokumen | 20 dokumen | 66,67% |
| X XX 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Tersusun | 7 dokumen | | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | 2 dokumen | 5 dokumen | 71,43% |
| X XX 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Laporan Yang Disusun | 3 dokumen | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 2 dokumen | 66,67% |
| X XX 01 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Laporan Yang Disusun | 3 dokumen | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 2 dokumen | 66,67% |
| X XX 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Yang Disusun | 9 dokumen | | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | 3 dokumen | 6 dokumen | 66,67% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| X XX 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Yang Disusun | 10 laporan | | 2 laporan | 4 laporan | 200% | 4 laporan | 8 laporan | 80,00% |
| X XX 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi keuangan | 243 dokumen | | 81 dokumen | 81 dokumen | 100% | 81 dokumen | 162 dokumen | 66,67% |
| X XX 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji ASN | 93 orang | | 86 orang | 86 orang | 100% | 89 orang | 89 orang | 95,70% |
| X XX 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN | 124 dokumen | | 40 dokumen | 36 dokumen | 90% | 42 dokumen | 76 dokumen | 62,90% |
| X XX 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan keuangan | 36 dokumen | | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | 12 dokumen | 24 dokumen | 66,67% |
| X XX 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Yang Disusun | 3 dokumen | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 2 dokumen | 66,67% |
| X XX 01 2.02 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Laporan Yang Disusun | 1 dokumen | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| X XX 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Yang Disusun | 36 dokumen | | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | 12 dokumen | 24 dokumen | 66,67% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| X XX 01 2.02 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Yang Disusun | 3 dokumen | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 2 dokumen | 66,67% |
| X XX 01 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi BMD | 48 dokumen | | 16 dokumen | 16 dokumen | 100% | 16 dokumen | 36 dokumen | 75,00% |
| X XX 01 2.03 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan RKBMD Tersusun | 2 dokumen | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| X XX 01 2.03 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah | 2 dokumen | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| X XX 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan BMD | 44 dokumen | | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | 16 dokumen | 28 dokumen | 63,64% |
| X XX 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pegawai | 6 kegiatan | | 2 kegiatan | 0,00 | 100% | 2 kegiatan | 0,00 | 0,00% |
| X XX 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah sarpras pegawai Disediakan | 18 set | | 6 set | 6 set | 100% | 6 set | 12 set | 33,33% |
| X XX 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Apatur Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan | 300 orang | | 0 | 0 | 0% | 2 orang | 0 orang | 0,00% |
| X XX 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah | 204 dokumen | | 68 dokumen | 68 dokumen | 100% | 69 dokumen | 137 dokumen | 67,16% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| X XX 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan Listrik Yang Disediakan | 5 jenis | | 5 jenis | 5 jenis | 100% | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| X XX 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis ATK Yang Disediakan | 20 jenis | | 20 jenis | 20 jenis | 100% | 20 jenis | 20 jenis | 100% |
| X XX 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Jenis Bahan/Peralatan Kebersihan Yang Disediakan | 15 jenis | | 15 jenis | 16,00 | 107% | 15 jenis | 16 jenis | 107% |
| X XX 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pegawai yang disediakan bahan natura | 120 orang | | 40 orang | 38 orang | 95% | 40 orang | 78 orang | 65% |
| X XX 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan Yang Disediakan | 14 jenis | | 14 jenis | 14 jenis | 100% | 14 jenis | 14 jenis | 100% |
| X XX 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan | 4 jenis | | 4 jenis | 4 jenis | 100% | 4 jenis | 4 jenis | 100% |
| X XX 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan | 64 kali | | 20 kali | 20 kali | 100% | 22 kali | 42 kali | 66% |
| X XX 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD yang disediakan | 18 unit | | 5 unit | 11 unit | 220% | 13 unit | 24 unit | 133% |
| X XX 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan dinas yang disediakan | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| X XX 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang disediakan | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| X XX 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor Yang Disediakan | 18 unit | | 5 unit | 11 unit | 220% | 13 unit | 24 unit | 133% |
| X XX 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah | 54 dokumen | | 55 dokumen | 55 dokumen | 100% | 54 dokumen | 54 dokumen | 50,46% |
| X XX 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat/Paket Yang Disediakan | 30 kali | | 14 kali | 9 kali | 64% | 8 kali | 17 kali | 56,67% |
| X XX 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi/Listrik/Bea Perizinan Yang Disediakan | 73 kali | | 25 kali | 25 kali | 100% | 24 kali | 49 kali | 67,12% |
| X XX 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pelayanan umum yang disediakan | 23 kali | | 3 kali | 3 kali | 100% | 10 kali | 20 kali | 66,67% |
| X XX 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah BMD yang dipelihara | 70 unit | | 60unit | 55 unit | 92% | 70 unit | 64 unit | 50,00% |
| X XX 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara | 25 unit | | 8 unit | 8 unit | 100% | 9 unit | 17unit | 68,00% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| X XX 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Meubeleur Yang Dipelihara | 33 unit | | 10 unit | 8 unit | 80% | 13 unit | 21 unit | 63,64% |
| X XX 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara | 124 unit | | 42 unit | 39 unit | 93% | 44 unit | 83 unit | 67,74% |
| 2 11 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup | 83,00% | | 50,00% | 50,00% | 100% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
| 2 11 02 2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun atau di review | 1 dokumen | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | |
| 11 02 2.01 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kajian RPPLH dan/atau inventarisasi data dan informasi Sumberdaya alam yang tersusun | 6 dokumen | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 4 dokumen | 66,67% |
| 2 11 02 2.01 02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi RPPLH | 4 kegiatan | | 2 kegiatan | 1 keg | 50% | 1 kegiatan | 3 kegiatan | 75,00% |
| 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota* | 1 Dokumen | | | | - | - | 1 Dokumen | 100% |
| 2.11.02.2.01.0005 | Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH | *Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan* | 2 Dokumen | | | | - | - | 2 Dokumen | 100% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2 11 02 2.02 | Penyelengaraan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS dan KRP yang disusun | 1 dokumen | | 0,00 | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| 2.11.02.2.02.0004 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS | *Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi* | 0 | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 2.11.02.2.02.0006 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | *Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun* | 3 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| 2 11 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu | 79,76% | | 75,00% | | | 76,19% | 76,19% | 76,19% |
| 2 11 03 2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah laporan uji kualitas lingkungan (air, udara dan biomassa) yang tersusun | 3 laporan | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 50,00% |
| 1 11 03 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah titik x frekuensi kegiatan uji air permukaan | 72 | | 56 kali | 56 kali | 100% | | | |
| | | Jumlah titik x frekuensi uji | 24 | | 8 kali | 8 kali | 100% | | | |
| | | Jumlah titik pantau uji biomassa | 16 titik (kumulatif) | | 4 titik (kumulatif) | 4 titik (kumulatif) | 100% | | | |
| 1 11 03 2.01 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah laporan inventarisasi GRK yang tersusun | 1 dokumen | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | | | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2 11 03 2.01 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah parameter yang diuji | 12 parameter | | 6 parameter | 6 parameter | 100% | | | |
| 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | 2 Dokumen | | | | - | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |
| 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | 1 Dokumen | | | | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| 2.11.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | *Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan* | 4 Kegiatan | | | | - | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | |
| 2.11.03.2.01.0005 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | *Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK* | 1 Dokumen | | | | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| 2.11.03.2.01.0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | *Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)* | 19 Lokasi | | | | - | 19 Lokasi | 19 Lokasi | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2.11.03.2.01.0008 | Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | *Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan* | 1 Laporan | | | | - | 1 Laporan | 1 Laporan | |
| 2.11.03.2.01.0009 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | *Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan* | 3 Unit | | | | - | 3 Unit | 3 Unit | |
| 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | *Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun* | 1 Dokumen | | | | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | *Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan* | 64 Paket | | | | - | 64 Paket | 64 Paket | |
| 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | 15 Dokumen | 6 parameter | 12 parameter | 12 parameter | 100% | 15 Dokumen | 15 Dokumen | |
| 2 11 03 2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran | 4 kali | | 4 kali | | 100% | 4 kali | 4 kali | 100,00% |
| 2 11 03 2.02 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah kegiatan peringatan/sosialisasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan | 4 Laporan | | 4 kali pelaksanaan | 4 kali pelaksanaan | 100% | 4 kali pelaksanaan | 4 kali pelaksanaan | 33,33% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2 11 03 2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan pemulihan pencemaran yang dilaksanakan | 1 kegiatan | | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 33,33% |
| 2 11 03 2.03 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | jumlah koordinasi penghentian sumber pencemar | 2 Dokumen | | | | | 3 kali | 3 kali | 100,00% |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan(%) | 0,05% | | 0,0035 | 0,0035 | | 0,037 | 0,037 | 100,00% |
| 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | luas taman/jalur hijau/taman kehati yang dikelola (ha) | 19,2 ha | | 18,85000 | 14,81279 | 79% | 18,850000 | 15,853833 | 82,57% |
| 2 11 04 2.01 01 | Penyusunan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati | Jumlah dokumen profil/inventarisasi keanekaragamann hayati | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% |
| 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | 15 Ha | | 14,09999 | 14,09999 | 100% | 14,81279 | 14,81279 | 100,00% |
| 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | *Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* | 300 Orang | | 4 kelompok | 4 kelompok | 100% | 4 kelompok | 8 kelompok | 66,67% |
| 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | 25 Unit | 5 unit | 7 unit | 7 unit | 100% | 4 unit | 14 unit | 56,00% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | *Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | 1 unit | 4 lokasi | 4 lokasi | 4 lokasi | | 1 unit | 1 unit | |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3 | 324 usaha/kegiatan | | 134 usaha/kegiatan | | | 174 usaha/kegiatan | 174 usaha/kegiatan | |
| 2.11.05.2.01 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | jumlah pengelola LB3 difasilitasi | 50 usaha/kegiatan | | 40 usaha/kegiatan | | | 40 usaha/kegiatan | 40 usaha/kegiatan | |
| 2.11.05.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | jumlah usaha/kegiatan yang difasilitasi terkait pengelolaan Limbah B3 | 104 usaha/kegiatan | | 30 usaha/kegiatan | 20 usaha/kegiatan | 66,7% | 75 usaha/kegiatan | 75 usaha/kegiatan | 72,12% |
| | | jumlah usaha/kegiatan yang dibina melalui sosialisasi | 100 usaha/kegiatan | | | | | 50 usaha/kegiatan | 50 usaha/kegiatan | 50,00% |
| 2.11.05.2.01.02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | jumlah kegiatan verlap | 190 kali | | 40 kali | 20 kali | | 75 kali | 95 kali | 50,00% |
| 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah pengumpul LB3 difasilitasi | 20 usaha/kegiatan | | 20 usaha/kegiatan | | | 20 usaha/kegiatan | 20 usaha/kegiatan | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2.11.05.2.02.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | jumlah usaha/kegiatan yang dibina | 45 usaha/kegiatan | | 5 usaha/kegiatan | | | 20 usaha/kegiatan | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.05.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan | 28 kali | | 8 kali | | | 10 kali | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.05.2.02.0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | *jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina* | 40 Usaha | | | | - | - | - | |
| 2.11.06.2 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina | 75,00% | | 64,00% | | | 66,67% | 66,67% | |
| 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan/atau diawasi | 88% | | 80 | | | 82 | 82 | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah permohonan rekomendasi persetujuan lingk yang diverifikasi dalam satu tahun | 210 berkas | | 70 berkas | 60 berkas | 85,71% | 72 berkas | 142 berkas | 67,62% |
| 2.11.06.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah apatur yang mengikuti diklat teknis bidang lingkungan hidup | 5 orang | | 2 orang | 2 orang | 100% | 3 orang | 0,00 | 40,00% |
| 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah usaha atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan yang diawasi | 150 usaha | | 48 usaha | 48 usaha | 100% | 50 usaha | 98 usaha | 65,33% |
| 2.11.06.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah koordinasi pengawasan dan penyelesaian masalah lingkungan | 8 kali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 kali | 4 kali | 62,50% |
| 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | *Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya* | 2 Orang | | | | - | - | - | |
| 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | 48 Badan Usaha | | | | - | - | - | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2.11.07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina | 70% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | jumlah kearifan lokal yang diakui | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 kelompok | 10 kelompok | 100,00% |
| 2.11.07.2.01.01 | koordinasi, sinkronisasi,penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | jumlah dokumen kajian kearifan lokal utk pengelolaan LH | 1 dokumen | | 0 | 0 | 0 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% |
| 2.11.07.2.02 | Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH | jumlah kearifan lokal yang dibina | 7 kelompok | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.07.2.02.01 | Pemberdayaan,kemitraan,pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA,kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah kegiatan pembinaan kearifan lokal | 3 kegiatan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH | 0,29 | | 12,48% | | | 15,90% | 15,9% | 5535,32% |
| 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | 55 lembaga | | 34 lembaga | | | 40 | 40 | 88,89% |
| 2.11.08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM LH | 1600 orang | | 500 orang | 440orang | 88,00% | 550 | 1050 | 65,63% |
| 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | jumlah lembaga yang didampingi | 16 lembaga | | 4 lembaga | 4 lembaga | 100% | 5,00 | 9,00 | 56,25% |
| 2.11.08.2.01.03 | Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup | jumlah kegiatan kampanye lingkungan hidup | 3 | | 0,00 | 0,00 | | 2,00 | 2,00 | 66,67% |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah Event Penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun | 3 kali | | 1 kali | 1 kali | | 2 kali | 2 kali | 66,67% |
| 2.11.9.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penghargaan yg diberikan | 3 kali | | 1 kali | 1 kali | | 2 | 2 | 66,67% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2.11.9.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | jumlah lembaga yang dinilai | 61 | | 20 lembaga | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 83,61% |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penanganan pengaduan / kasus pencemaran lingkungan yang dapat diselesaikan | 90,0% | | 80,0% | 80,0% | | 82,5% | 82,5% | 91,67% |
| 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase pengaduan pencemaran dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti | 100% | | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% |
| 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan verifikasi pengaduan lingkungan | 30 kegiatan | | 10 kali | 14 kali | 140% | 10 kegiatan | 24 kegiatan | 80,00% |
| 2.11.10.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi | 12 kali | | 4 kali | 4 kali | 100% | 4 kali | 8 kali | 66,67% |
| 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | 20 Pengaduan | | | | - | - | - | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2.11.10.2.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | *Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota* | 1 Perkara | | | | - | - | - | |
| 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | *Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota* | 5 Perkara | | | | - | - | - | |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Prosentase sampah yang dikelola | 100,00% | | 56,5% | 29,68% | 52,49% | 41,75% | 41,8% | 41,75% |
| 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | Jumlah sampah yang dikelola (ton/th) | 189471,5 ton | | 48.983,00 | | 0% | 77.854,50 | 77.854,50 | |
| 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | 114 Kelompok | | 72 kelompok | 72 kelompok | 100% | 24 kelompok | 96 kelompok | 84% |
| 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada* | 12 Dokumen | | | | - | - | - | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir* | 10 Unit | | | | - | - | - | |
| 2.11.11.2.01.0009 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | *Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | 25 Unit | | | | - | - | - | |
| 2.11.11.2.01.0011 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | *Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah* | 3 Dokumen | | | | - | - | - | |
| 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | *Jumlah sampah yang tertanganim elalui proses pengangkutan* | 45000 Ton | | 45000 | 21698,17 | 48% | - | - | |
| 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | *Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali* | 15 Ton | | | | - | - | - | |
| 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan | *Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | 25 Unit | | | | - | - | - | |
| 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | *Persentase luas layanan pengumpulan sampah* | 50 Persentase | | | | - | - | - | |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2025 | Realisai Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Bejalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11 = (10/4)*100 |
| 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | *Jumlah sampah yang tertanganim elalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan* | 35000 Ton | | | | - | - | - | |
| 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | *Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah* | 1 Laporan | | | | - | - | - | |
| 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | *Jumlah sampah yang terdaur ulang* | 15 Ton | | | | - | - | - | |
| 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | *jumlah sampah yang tertanganim elalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | 35000 Ton | | 35000 | 21698,17 | 62% | - | - | |

## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2016 tantang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup;
f. pembinaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;
g. pembinaan UPTD;
h. pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup;
i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis pelayanan yang diemban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri secara garis besar adalah bidang lingkungan hidup dengan dua kewenangan utama, yaitu kewenangan regulasi dan teknis operasional. Dalam kewenangan regulasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dapat mengeluarkan kebijakan teknis yang mengatur pola pengelolaan bidang lingkungan hidup. Dalam kewenangan teknis operasional, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri melakukan langsung operasional bidang lingkungan hidup. Pola dua kewenangan ini memberikan tantangan yang signifikan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri untuk melakukan

integrasi dan menjadikan kondisi ini sebagai kesempatan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri mengemban misi ke 7 yang berkenaan dengan upaya mewujudkan optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, sumber daya alam dan mitigasi bencana. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup menentukan tujuan berupa meningkatkan kualitas lingkungan yang kemudian dijabarkan dalam sasaran program, Kegiatan dan sub kegiatan, hal itu dapat dilihat pada indikator-indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri secara garis besar dapat dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian kinerja selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri**

**SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri**

| No. | Indikator Kinerja | SPM | IKK | Target Renstra | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Inderks Kualitas air | | Inderks Kualitas air | 62,77 | 62,82 | 62,87 | 62,92 | 62,77 | 62,97 | 62,97 | 62,97 | |
| 2 | Indeks Kualitas Udara | | Indeks Kualitas Udara | 77,5 | 77,56 | 77,62 | 77,68 | 76,68 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | |

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri mempunyai tugas melaksanakan Lingkungan Hidup, Kehutanan serta Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pelayanan yang berhubungan dengan :

1. Pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak terhadap lingkungan;

2. Pelayanan persampahan yang meliputi penyapuan jalan – jalan utama di Kabupaten Kediri, penempatan Tempat Penampungan Sampah (TPS) dan layanan pengangkutan sampah dari penampungan sampah sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS). Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan pembinaan terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan sampah dari sumbernya;

3. Dinas Lingkungan hidup juga melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa RTH kawasan perkotaan;

4. Disamping itu Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan konservasi daerah tangkapan air dan pencegahan tanah longsor dikawasan rawan longsor;

5. Untuk menunjang kinerja dalam hal pengawasan kegiatan potensi penghasil limbah maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan UPTD berupa Laboratorium Lingkungan Hidup, yang telah beroperasi pada tahun 2019 khusus untuk pengawasan dan pada tahun 2022 telah melaksankan proses akreditasi dan akan terus dilakukan peningkatan parameter yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelayanan umum menunggu perubahan Perda tentang Pajak dan Retribusi.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ditemui beberapa permasalahan dan hambatan seperti kurangnya sumber pendanaan, keterbatasan sarana dan prasarana kerja, lemahnya kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan dan hambatan tersebut diusahakan untuk dapat diatasi dengan memafaatkan sumberdaya yang ada sehingga tidak berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap pencapaian program bidang Lingkungan Hidup dan *SDG's*.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah bahwa isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi padahal saat ini masalah lingkungan merupakan isu global sehingga mau tidak mau masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu pusat perhatian karena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance). Permasalah yang dihadapi dalam menyelenggaran tugas dan fungsi antara lain :

A. TIMBULAN SAMPAH YANG SEMAKIN MENINGKAT.

1. Peningkatan cakupan pelayanan untuk mencapai total pelayanan secara nasional yang selaras dengan sasaran *SDG's* memerlukan investasi sarana dan prasarana persampahan yang cukup dan harus didukung oleh kesiapan manajemen dan dukungan peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan sampah secara lebih profesional dengan dukungan SDM yang memadai serta dimungkinkannya kerjasama dengan masyarakat dan swasta untuk melaksanakan penanganan sampah.
3. Penggalian sumber dana untuk investasi terutama dari pihak swasta yang harus sinergi dengan penerapan pola pemulihan biaya (cost recovery) secara bertahap.
4. Kondisi TPA yang dioperasikan secara sanitary landfill memerlukan upaya rehabilitasi agar pencemaran lingkungan dan sumber-sumber air dapat diminimalkan.
5. Program 3 R harus dilaksanakan melalui Pendidikan, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
6. Sentuhan teknologi sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan TPA terutama berkaitan dengan pemanfaatan gas landfill, insinerator ramah lingkungan dan teknologi pengolahan sampah lainnya.
7. *Social enforcement* sebagai solusi atas pelanggaran pembuangan sampah.

B. BERKURANGNYA PERAN PEMERINTAH DAERAH AKIBAT PENYEDERHANAAN IJIN LINGKUNGAN

1. Pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang (spatial planning) yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan adanya standar lingkungan seperti standar ambien untuk air permukaan,

air bawah tanah, dan udara sebagai ambang batas baku mutu kegiatan industri sehingga kualitas lingkungan akan bisa lebih terjaga.

2. Penerapan ijin lingkungan dalam setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar setiap usaha atau kegiatan layak secara ekonomis, teknologi dan lingkungan.
3. Ijin lingkungan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja disederhanakan sebagai bentuk penyederhanaan ijin untuk memudahkan investasi. Ijin lingkungan hanya berdasarkan komitmen dimana pelaku usaha dapat mendapatkan izin usaha dan izin lingkungan dengan komitmen akan melengkapi persyaratan lainnya kemudian. Artinya pelaku usaha dapat melangsungkan kegiatan usahanya dengan melengkapi izin di kemudian hari.
4. Ijin lingkungan berfungsi sebagai instrument pencegahan yang dapat membendung dampak negatif pembangunan ekonomi terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. UU Omnibus Law diharapkan dapat menyederhanakan ijin usaha dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup, sehingga diperlukan sebuah kajian yang lebih komprehensif yang mengidentifikasi hambatan berusaha untuk menemukan factor penghambat investasi apakah di aspek substansi perijinan atau di aspek proses perijinan.
6. Kemudahan berusaha dengan menyederhanakan ijin lingkungan seperti dalam UU Cipta Kerja justru menempatkan pelaku usaha dalam kondisi ketidakpastian hukum dan menghilangkan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
7. Penyederhanaan ijin lingkungan juga dilakukan oleh KLHK dengan PermenLHK nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
8. AMDAL dan RDTR tidak bisa untuk disetarakan. RDTR berorientasi pada sebuah kebijakan publik, sementara AMDAL berorientasi pada proyek/kegiatan tertentu. AMDAL adalah instrumen pengendalian dampak lingkungan terhadap rencana kegiatan dalam skala tapak proyek, sementara RDTR adalah instrumen pengendalian ruang berdasarkan tata guna lahan peruntukan.

9. RDTR hanya mengatur soal zonasi atau peruntukan kawasan dan tidak spesifik mengatur mengenai detail suatu proyek dan tidak mengatur kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti dalam AMDAL. RDTR tidak bisa menggantikan fungsi AMDAL sebagai rangkaian dari izin lingkungan.

C. BELUM ADA KEBIJAKAN TENTANG PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

1. Belum adanya data RTH yang sesuai dengan klasifikasi sesuai peraturan perundang-undangan
2. RTH Kabupaten Kediri belum mencapai ketentuan yaitu minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
3. Dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kediri diperlukan masterplan untuk memberikan arah dan kepastian pembangunan RTH yang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah

Untuk memenuhi tanggung jawab penyelanggaraan urusan Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri maka startegi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan pengangkutan sampah dalam rangka memperluas cakupan pelayanan persampahan/kebersihan melalui penambahan sarana prasarana dan SDM pengelolaan sampah serta meningkatkan pengelolan sampah bernbasis masyarakat;

2. Pengelolaan dan Pemeliharaan RTH publik yang sudah ada serta pembangunan dan penataan RTHKP di ibu kota kecamatan;

3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan pembinaan dan bimtek serta sosialisasi.

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen yang dimaksud antara lain terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan analisis kebutuhan didapatkan perbedaan jumlah anggaran dengan rancangan awal RKPD hal ini dikarenakan adanya perubahan kegiatan prioritas yaitu mendukung penataan kawasan kampung inggris, penataan kawasan bandara, penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten dan berdasarkan analisa di lapangan maka diperlukan pergeseran/penambahan akibat perubahan harga.
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Selengkapnya sebagaimana
Tabel 2.3. Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kediri berikut :

**Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kediri**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | **84.884.585.670,00** | | | | **50.088.825.848,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **84.884.585.670,00** | | | | **50.088.825.848,00** | |
| 1. | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | *Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup* | **88 %** | **839.886.000,00** | | *Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup* | **88 %** | **489.886.000,00** | |
| | ***2.11.02.2.01*** | ***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*** | *Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Yang Disusun atau Direview* | ***1 dokumen*** | ***485.721.000,00*** | | *Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Yang Disusun atau Direview* | ***1 dokumen*** | 135.721.000,00 | |
| | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota* | 1 Dokumen | 13.132.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota* | 1 Dokumen | 13.132.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.02.2.01.0005 | Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH | *Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan* | 2 Dokumen | 472.589.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan* | 2 Dokumen | 122.589.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | ***2.11.02.2.02*** | ***Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota*** | *Jumlah Dokumen KLHS dan KRP Yang Disusun* | ***0 dokumen*** | ***354.165.000,00*** | | *Jumlah Dokumen KLHS dan KRP Yang Disusun* | ***0 dokumen*** | 354.165.000,00 | |
| | 2.11.02.2.02.0004 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS | *Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi* | 2 Dokumen | 13.972.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi* | 2 Dokumen | 13.972.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.02.2.02.0006 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | *Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun* | 1 Dokumen | 340.193.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun* | 1 Dokumen | 340.193.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 2. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | *Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu* | **79,76 %** | **2.363.768.000,00** | | *Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu* | **79,76 %** | **2.363.768.000,00** | |
| | ***2.11.03.2.01*** | ***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*** | *Jumlah Laporan Uji Kualitas Lingkungan (Air, Udara, dan Biomassa) Yang Tersusun* | ***3 laporan*** | ***1.850.498.800,00*** | | *Jumlah Laporan Uji Kualitas Lingkungan (Air, Udara, dan Biomassa) Yang Tersusun* | ***3 laporan*** | 1.850.498.800,00 | |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | 2 Dokumen | 288.920.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | 2 Dokumen | 288.920.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | 1 Dokumen | 15.860.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | 1 Dokumen | 15.860.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | *Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan* | 4 Kegiatan | 102.035.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan* | 4 Kegiatan | 102.035.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.03.2.01.0005 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | *Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK* | 1 Dokumen | 89.640.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK* | 1 Dokumen | 89.640.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.03.2.01.0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | *Data dan Informasi Indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)* | 19 Lokasi | 51.582.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Data dan Informasi Indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)* | 19 Lokasi | 51.582.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.03.2.01.0008 | Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | *Meningkatnya Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim* | 1 Laporan | 236.990.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Meningkatnya Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim* | 1 Laporan | 236.990.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.03.2.01.0009 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | *Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan* | 3 Unit | 5.280.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan* | 3 Unit | 5.280.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | *Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun* | 1 Dokumen | 95.280.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun* | 1 Dokumen | 95.280.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | *Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan* | 64 Paket | 275.636.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan* | 64 Paket | 275.636.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | 15 Dokumen | 689.275.800,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | 15 Dokumen | 689.275.800,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | ***2.11.03.2.02*** | ***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran*** | ***4 kali*** | ***501.257.200,00*** | | ***Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran*** | ***4 kali*** | 501.257.200,00 | |
| | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | *Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan* | 4 Laporan | 501.257.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan* | 4 Laporan | 501.257.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ***2.11.03.2.03*** | ***Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran Yang Dilaksanakan*** | ***1 kegiatan*** | ***2.000.000,00*** | | ***Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran Yang Dilaksanakan*** | ***1 kegiatan*** | 2.000.000,00 | |
| | 2.11.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan* | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan* | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 3, | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | ***Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan*** | **0,060 %** | **23.406.800.000,00** | | ***Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan*** | **0,060 %** | **22.305.800.000,00** | |
| | ***2.11.04.2.01*** | ***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*** | ***Luas Taman/Jalur Hijau/Taman Kehati Yang Dikelola (ha)*** | ***19,2 %*** | ***23.405.800.000,00*** | | ***Luas Taman/Jalur Hijau/Taman Kehati Yang Dikelola (ha)*** | ***19,2 %*** | 22.305.800.000,00 | |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | 15 Ha | 15.000.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | 15 Ha | 13.900.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | *Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* | 300 Orang | 765.800.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* | 300 Orang | 765.800.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | 10 Unit | 7.200.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | 10 Unit | 7.200.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | *Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | 4 Unit | 440.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | 4 Unit | 440.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 4, | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | ***Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3*** | **324 usaha/kegiatan** | **68.500.400,00** | | ***Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3*** | **324 usaha/kegiatan** | **59.338.400,00** | |
| | ***2.11.05.2.01*** | ***Penyimpanan sementara Limbah B3*** | ***Jumlah Pengelola LB3 Yang Difasilitasi*** | ***50 usaha/kegiatan*** | ***16.560.000,00*** | | ***Jumlah Pengelola LB3 Yang Difasilitasi*** | ***50 usaha/kegiatan*** | 13.248.000,00 | |
| | 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | *Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | 40 Dokumen | 6.624.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | 40 Dokumen | 6.624.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | *Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3* | 40 Laporan | 9.936.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3* | 40 Laporan | 6.624.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | ***2.11.05.2.02*** | ***Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*** | *Jumlah Pengumpul LB3 Difasilitasi* | *20 usaha/kegiatan* | ***51.940.400,00*** | | *Jumlah Pengumpul LB3 Difasilitasi* | *20 usaha/kegiatan* | 46.090.400,00 | |
| | 2.11.05.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | *Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | 3 Dokumen | 6.288.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | 3 Dokumen | 6.288.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya* | 5 Dokumen | 5.460.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya* | 5 Dokumen | 5.460.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.05.2.02.0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | *jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina* | 40 Usaha | 40.192.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina* | 40 Usaha | 34.342.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 5, | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | *Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina* | **75 %** | **299.880.000,00** | | *Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina* | **75 %** | **299.880.000,00** | |
| | ***2.11.06.2.01*** | ***Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*** | *Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dibina dan/atau Diawasi* | *88 %* | ***299.880.000,00*** | | *Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dibina dan/atau Diawasi* | *88 %* | 299.880.000,00 | |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | 50 Dokumen | 236.180.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | 50 Dokumen | 236.180.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | *Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya* | 2 Orang | 36.786.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya* | 2 Orang | 36.786.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | 48 Badan Usaha | 26.914.000,00 | Kab. Kediri, Badas, Semua Kel/Desa | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | 48 Badan Usaha | 26.914.000,00 | Kab. Kediri, Badas, Semua Kel/Desa |
| 6. | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | ***Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina*** | **70 %** | **60.061.600,00** | | ***Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina*** | **70 %** | **60.061.600,00** | |
| | ***2.11.07.2.01*** | ***Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH*** | ***Jumlah Kearifan Lokal Yang Diakui*** | ***0 kelompok*** | ***50.000.000,00*** | | ***Jumlah Kearifan Lokal Yang Diakui*** | ***0 kelompok*** | 50.000.000,00 | |
| | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH* | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH* | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | ***2.11.07.2.02*** | ***Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH*** | ***Jumlah Kearifan Lokal Yang Dibina*** | ***7 kelompok*** | ***10.061.600,00*** | | ***Jumlah Kearifan Lokal Yang Dibina*** | ***7 kelompok*** | 10.061.600,00 | |
| | 2.11.07.2.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | *Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan* | 1 Dokumen | 10.061.600,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan* | 1 Dokumen | 10.061.600,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 7. | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | ***Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH*** | **28,72 %** | **238.938.400,00** | | ***Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH*** | **28,72 %** | **238.938.400,00** | |
| | ***2.11.08.2.01*** | ***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina*** | ***55 lembaga*** | ***236.938.400,00*** | | ***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina*** | ***55 lembaga*** | 236.938.400,00 | |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | *Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH* | 50 Lembaga | 236.938.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH* | 50 Lembaga | 236.938.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | *Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun* | **3 kali** | **24.998.000,00** | | *Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun* | **3 kali** | **24.998.000,00** | |
| | ***2.11.09.2.01*** | ***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | *Jumlah Penghargaan Yang Diberikan* | *3 kali* | ***24.998.000,00*** | | *Jumlah Penghargaan Yang Diberikan* | *3 kali* | 24.998.000,00 | |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | 6 Entitas | 24.998.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | 6 Entitas | 24.998.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 9. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | *Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan* | **80 %** | **117.741.000,00** | | *Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan* | **80 %** | **117.741.000,00** | |
| | ***2.11.10.2.01*** | ***Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*** | *Persentase Pengaduan Pencemaran dan Sengketa Lingkungan Yang Ditindaklanjuti* | *100 %* | ***117.741.000,00*** | | *Persentase Pengaduan Pencemaran dan Sengketa Lingkungan Yang Ditindaklanjuti* | *100 %* | 117.741.000,00 | |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | 20 Pengaduan | 110.606.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | 20 Pengaduan | 110.606.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.10.2.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | *Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota* | 1 Perkara | 1.245.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota* | 1 Perkara | 1.245.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | *Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota* | 5 Perkara | 5.890.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota* | 5 Perkara | 5.890.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 10. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | *Prosentase sampah yang dikelola* | **100 %** | **25.642.949.220,00** | | *Prosentase sampah yang dikelola* | **100 %** | **13.023.899.600,00** | |
| | ***2.11.11.2.01*** | ***Pengelolaan Sampah*** | *Jumlah Sampah Yang Dikelola (ton/th)* | ***189471,5 ton*** | ***25.642.949.220,00*** | | *Jumlah Sampah Yang Dikelola (ton/th)* | ***189471,5 ton*** | 13.023.899.600,00 | |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | 40 Kelompok | 353.822.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | 40 Kelompok | 308.722.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada* | 12 Dokumen | 62.460.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada* | 12 Dokumen | 49.896.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir* | 10 Unit | 8.502.384.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir* | 10 Unit | 734.600.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.11.2.01.0009 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | *Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | 25 Unit | 1.519.487.800,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | 25 Unit | 1.516.660.800,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.11.2.01.0011 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | *Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota* | 3 Dokumen | 144.117.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota* | 3 Dokumen | 120.962.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan* | 45000 Ton | 4.492.800.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan* | 45000 Ton | 1.763.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | *Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali* | 15 Ton | 24.428.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali* | 15 Ton | 24.428.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | *Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | 25 Unit | 7.040.954.020,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | 25 Unit | 5.797.987.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | *Persentase luas layanan pengumpulan sampah* | 50 Persentase | 158.533.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Persentase luas layanan pengumpulan sampah* | 50 Persentase | 143.110.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan* | 35000 Ton | 629.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan* | 35000 Ton | 36.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | *Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah* | 1 Laporan | 68.321.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah* | 1 Laporan | 63.171.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | *Jumlah sampah yang terdaur ulang* | 15 Ton | 71.735.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah sampah yang terdaur ulang* | 15 Ton | 68.455.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | *Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | 35000 Ton | 2.574.906.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | 35000 Ton | 2.396.906.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 11. | - | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | *Cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah* | **100%** | **11.834.074.960,00** | | *Cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah* | **100%** | **11.114.326.848,00** | |
| | - | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | *Jumlah dok. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun* | 12 Dokumen | ***34.178.800,00*** | | *Jumlah dok. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun* | 12 Dokumen | 34.178.800,00 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 3 Dokumen | 6.040.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 3 Dokumen | 6.040.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 1 Dokumen | 3.682.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 1 Dokumen | 3.682.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | 1 Dokumen | 2.625.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | 1 Dokumen | 2.625.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 2 Laporan | 2.180.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 2 Laporan | 2.180.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 5 Laporan | 19.651.800,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 5 Laporan | 19.651.800,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | - | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | - | ***9.312.996.550,00*** | | *Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi keuangan* | 25 Dokumen | 9.292.796.848,00 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 1008 Orang/bulan | 8.925.026.550,00 | Kab. Kediri, Ngasem, Tugurejo | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 1008 Orang/bulan | 8.997.826.848,00 | Kab. Kediri, Ngasem, Tugurejo |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | 362.040.000,00 | Kab. Kediri, Ngasem, Tugurejo | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | 18.210.000,00 | Kab. Kediri, Ngasem, Tugurejo |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 12 Dokumen | 18.210.000,00 | Kab. Kediri, Ngasem, Tugurejo | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 12 Dokumen | 269.040.000,00 | Kab. Kediri, Ngasem, Tugurejo |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | 12 Laporan | 4.640.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | 12 Laporan | 3.080.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 1 Laporan | 3.080.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 1 Laporan | 4.640.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | - | ***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*** | - | - | ***1.315.000,00*** | | *Jumlah dokumen Administrasi BMD* | 4 Dokumen | 1.315.000,00 | |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 4 Laporan | 1.315.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 4 Laporan | 1.315.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | - | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | - | ***313.405.700,00*** | | *Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah* | - | 262.521.200,00 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 1 Paket | 1.187.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 1 Paket | 1.187.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 6 Paket | 69.936.500,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 6 Paket | 67.825.100,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 2 Paket | 19.689.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 2 Paket | 15.062.300,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 12 Paket | 3.509.800,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 12 Paket | 2.864.600,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 13 Paket | 18.010.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 13 Paket | 17.348.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | 12 Dokumen | 6.840.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | 12 Dokumen | 6.840.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | 194.233.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | 151.394.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | - | ***458.278.900,00*** | | *Jumlah BMD yang disediakan* | 4 unit | 266.462.000,00 | |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | 3 Unit | 360.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | 2 Unit | 224.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 3 Unit | 52.010.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 1 Unit | 7.290.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 2 Unit | 46.268.900,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 1 Unit | 35.172.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | - | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | - | ***1.315.338.000,00*** | | *Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah* | 38 Dokumen | 1.190.903.000,00 | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 4 Laporan | 3.200.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 4 Laporan | 3.200.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 24 Laporan | 551.055.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 24 Laporan | 502.620.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 13 Laporan | 761.083.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 13 Laporan | 685.083.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | - | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | - | ***56.750.000,00*** | | *Jumlah BMD yang dipelihara* | 29 Unit | 43.450.000,00 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 5 Unit | 13.100.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 5 Unit | 12.400.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | 5 Unit | 1.800.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | 4 Unit | 1.200.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 20 Unit | 41.850.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 20 Unit | 29.850.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | - | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | - | - | ***141.812.000,00*** | | *Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pegawai* | 1 Kegiatan | 22.700.000,00 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 40 Orang | 120.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 40 Orang | 3.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISI KEBUTUHAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | 44 Unit | 21.812.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | 44 Unit | 19.700.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | **JUMLAH** | | | | **84.884.585.570,00** | | | | **50.088.826.848,00** | |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Dimana usulan-usulan tersebut akan diselaraskan dengan kegiatan dan perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.

**Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2025**

**SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri**

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Persampahan | | | | |
| | - Sosialisasi pengelolaan sampah | Desa Bendo Kecamatan Pare | | 1 kegiatan | Musrenbang |
| | - Pelatihan pengelolaan sampah | Desa Tunglur Kecamatan Badas | | 1 kegiatan | Musrenbang |

# BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN SKPD

## 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup yaitu :

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu : Indonesia Asri dan Lestari yang diupayakan dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar Pembangunan.

B. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan sebanyak 1 Prioritas Nasional yang terkait dengan lingkungan hidup yang sesuai kondisi di wilayah Kabupaten Kediri yaitu : Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

   Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah: Peningkatan

kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:

1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU); (2) indeks kualitas air (IKA) (3) indeks kualitas air laut (IKL)
2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan; (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional; (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola; (5) luas Kawasan konservasi perairan; (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun.
3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024); (3) jumlah limbah B3 yang terkelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024)
4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024); (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024); (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024).
5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK); (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani; (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman; (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan

pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).

C. Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkaitan dengan Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) 6 terdiri dari : 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Rincian masing-masing dijelaskan di bawah ini.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah

1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) pemantauan kualitas udara, air dan air laut; (2) pemantaun kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan; (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan; (4) pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir; (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan; (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.

2) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik; (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas skala kecil (PESK); (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu.

3) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pemulihan lahan gambut dan areal bekas terbakar; (2) pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3; (3) pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (4) pemulihan habitat spesies terancam punah (5) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar (TSL) terancam punah.

4) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah; (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

sasaran umum pembangunan yang ingin dicapai adalah pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam secara lestari untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, penegakan aturan hukum lingkungan, pemulihan lingkungan hidup dan meningkatkan pencegahan, mitigasi bencana dan kehatanan masyarakat terhadap bencana. Secara khusus yang hendak dicapai adalah: 1. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH); 2. Peningkatan efektivitas dan kinerja pengelolaan persampahan; 3. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup; 4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 5. Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 6. Fasilitasi penyusunan dokumen lingkungan hidup

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dalam melaksanakan fungsinya berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Kab. Kediri yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2021-2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam rencana strategis instansi pemerintah memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Kab. Kediri perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi serta senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat

meningkatkan akuntabilitas kinerja yang beorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci,terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tujuan** :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

**Sasaran** :

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Adapun indikator dan target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator | Rumus Perhitungan | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Indeks Kualitas Air | $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ | 62,77 | 62,77 | 62,82 | 62,87 | 62,92 |
| | Indeks Kualitas Udara | $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}(I_{EU} - 0,1)\right)$<br>$I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$<br>$\text{Indeks } NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$<br>$\text{Indeks } SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ | 77,44 | 77,50 | 77,56 | 77,62 | 77,68 |

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2023 target tujuan dan sasaran telah mencapai angka yang melebihi target yaitu untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Udara sehingga pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pada Tahun 2025 ini dilakukan penyesuaian target kinerja. Dengan memperhatikan realisasi

kinerja Tahun 2023, maka target kinerja pada Tahun 2025 sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator | Rumus Perhitungan | Realisasi 2023 | Target Renstra 2025 | Target Pada Renja 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Indeks Kualitas Air | $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ | 62,97 | 62,92 | 62,92 |
| | Indeks Kualitas Udara | $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}(I_{EU} - 0,1)\right)$<br>$I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$<br>$\text{Indeks } NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$<br>$\text{Indeks } SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ | 86,12 | 77,68 | 86,12 |

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program merupakan kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sehingga kerangka anggaran dapat menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Kegiatan adalah sebagai pelaksana setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

program dan kegiatan yang dirancang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2024 sebagaimana rincian di bawah ini :

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Program ini memuat kegiatan penunjang urusan pemerintahan yaitu kegiatan rutin administrasi perkantoran dengan rincian kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

   Program ini memuat kegiatan penyusunan dokumen kajian perencanaan lingkungan hidup seperti KLHS dan RPPLH, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

   a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
   b. Penyelengaraan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup

   Program ini memuat kegiatan upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

   a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
   c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

   Program ini mengampu kegiatan RTH dan konservasi sumber daya alam, dengan kegiatan :

   a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

   Program ini mengampu kegiatan pembinaan pengelolaan LB3 yang berhubung dengan penyimpanan dan pengumpulan LB3 sekala kabupaten, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

   a. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
   b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini mengampu kegiatan pembinaan dan pengwasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

   Program ini dititikberatkan pada upaya melestarikan kearifan local yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, dengan kegiatan :

   a. Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
   b. Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

   Program ini untuk pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan melalui kegiatan sekolah adiwiyata, desa berseri, saka kalpataru dan ecopesantren, dengan nama kegiatan :

   a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

   Program ini difokuskan pada pembinaan pengelolaan lingkungan melalui pemberiaan penghargaan pada lembaga/kelompok masyarakat/ individu yang telah melakukan pelestarian lingkungan, dengan nama kegiatan :

   a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

    Program ini mengampu kegiatan penanganan pengaduan lingkungan degan nama kegiatan sebagai berikut :

    a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

11. Program Pengelolaan Persampahan

    Peogram ini mengampu kegiatan yang berkaitan dangan pengelolaan persampahan mulai darai pengangkutan, pengurangan dan pembinaan masyarakat tentang pengelolaan sampah.

## PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KEDIRI
## TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **50.086.625.848,00** | | | | | | | **46.202.979.200,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **50.086.625.848,00** | | | | | | | **46.202.979.200,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **50.086.625.848,00** | | | | | | | **46.202.979.200,00** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **11.114.326.848,00** | | | | | | **-** | **11.648.609.000,00** | |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 34.178.800,00 | | | - | - | - | - | 34.497.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 6.040.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 6.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.682.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 3.850.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.625.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 2.750.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2.180.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 2.197.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 19.651.800,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 19.700.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 9.292.796.848,00 | | | - | - | - | - | 9.392.540.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1008 Orang/bulan | 8.997.826.848,00 | Kab. Kediri, Ngasem, Tugurejo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 8.999.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 18.210.000,00 | Kab. Kediri, Ngasem, Tugurejo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 22.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 269.040.000,00 | Kab. Kediri, Ngasem, Tugurejo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 362.040.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.080.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 4.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 4.640.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 5.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.315.000,00 | | | - | - | - | - | 1.492.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 1.315.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 1.492.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 22.700.000,00 | | | - | - | - | - | 180.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 44 Unit | 19.700.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 40 Orang | 3.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 180.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 262.521.200,00 | | | - | - | - | - | 316.300.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.187.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 1.200.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 67.825.100,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 15.062.300,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 17.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 2.864.600,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 3.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 17.348.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 18.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 6.840.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 6.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 151.394.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 195.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 266.462.000,00 | | | - | - | - | - | 255.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 224.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 35.172.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 7.290.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 5.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.190.903.000,00 | | | - | - | - | - | 1.400.180.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 4 Laporan | 3.200.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 3.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 24 Laporan | 502.620.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 618.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 685.083.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 778.680.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 43.450.000,00 | | | - | - | - | - | 68.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 12.400.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 26.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 1.200.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 29.850.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 42.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup*** | **-** | | | **83 %** | **489.886.000,00** | | | | | | **-** | **28.000.000,00** | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Yang Disusun atau Direview* | - | | | 1 dokumen | 135.721.000,00 | | | - | - | - | - | 13.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 13.132.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 13.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0005 | Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan* | | | | 2 Dokumen | 122.589.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen KLHS dan KRP Yang Disusun* | - | | | 0 dokumen | 354.165.000,00 | | | - | - | - | - | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02.0004 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi* | | | | 2 Dokumen | 13.972.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02.0006 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 340.193.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu*** | **-** | | | **79,76 %** | **2.353.756.000,00** | | | | | | **-** | **2.438.500.000,00** | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Uji Kualitas Lingkungan (Air, Udara, dan Biomassa) Yang Tersusun* | - | | | 3 laporan | 1.850.498.800,00 | | | - | - | - | - | 1.636.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | | | | 2 Dokumen | 288.920.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 300.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 15.860.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 26.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan* | | | | 4 Kegiatan | 102.035.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 86.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0005 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK* | | | | 1 Dokumen | 89.640.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 87.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)* | | | | 19 Lokasi | 51.582.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 57.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0008 | Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim* | | | | 1 Laporan | 236.990.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 70.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0009 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan* | | | | 3 Unit | 5.280.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 5.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 95.280.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 105.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan* | | | | 64 Paket | 275.636.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | | | | 15 Dokumen | 689.275.800,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran* | - | | | 4 kali | 501.257.200,00 | | | - | - | - | - | 800.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan* | | | | 4 Laporan | 501.257.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 800.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran Yang Dilaksanakan* | - | | | 1 kegiatan | 2.000.000,00 | | | - | - | - | - | 2.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan* | | | | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 2.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | ***Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan*** | **-** | | | **0,050 %** | **22.305.800.000,00** | | | | | | **-** | **14.230.000.000,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Luas Taman/Jalur Hijau/Taman Kehati Yang Dikelola (ha)* | - | | | 19,2 % | 22.305.800.000,00 | | | - | - | - | - | 14.230.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 15 Ha | 13.900.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* | | | | 300 Orang | 765.800.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 780.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | | | | 10 Unit | 7.200.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 8.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 4 Unit | 440.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 450.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | ***Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3*** | **-** | | | **324 usaha/kegiatan** | **59.338.400,00** | | | | | | **-** | **68.650.000,00** | |
| | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | *Jumlah Pengelola LB3 Yang Difasilitasi* | - | | | 50 usaha/kegiatan | 13.248.000,00 | | | - | - | - | - | 16.650.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 40 Dokumen | 6.624.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 6.650.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3* | | | | 40 Laporan | 6.624.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pengumpul LB3 Difasilitasi* | - | | | 20 usaha/kegiatan | 46.090.400,00 | | | - | - | - | - | 52.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 3 Dokumen | 6.288.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 6.300.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya* | | | | 5 Dokumen | 5.460.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 5.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02.0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina* | | | | 40 Usaha | 34.342.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 40.200.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | ***Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina*** | **-** | | | **75 %** | **299.880.000,00** | | | | | | **-** | **308.080.000,00** | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dibina dan/atau Diawasi* | - | | | 88 % | 299.880.000,00 | | | - | - | - | - | 308.080.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | | | | 50 Dokumen | 236.180.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 244.300.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya* | | | | 2 Orang | 36.786.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 36.780.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | | | | 48 Badan Usaha | 26.914.000,00 | Kab. Kediri, Badas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 27.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7. | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | ***Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina*** | **-** | | | **70 %** | **60.061.600,00** | | | | | | **-** | **27.500.000,00** | |
| | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | *Jumlah Kearifan Lokal Yang Diakui* | - | | | 0 kelompok | 50.000.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.07.2.02 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | *Jumlah Kearifan Lokal Yang Dibina* | - | | | 7 kelompok | 10.061.600,00 | | | - | - | - | - | 27.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.07.2.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan* | | | | 1 Dokumen | 10.061.600,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 27.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | ***Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH*** | **-** | | | **28,72 %** | **236.938.400,00** | | | | | | **-** | **220.000.000,00** | |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina* | - | | | 55 lembaga | 236.938.400,00 | | | - | - | - | - | 220.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH* | | | | 50 Lembaga | 236.938.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 220.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9. | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | ***Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun*** | **-** | | | **3 kali** | **24.998.000,00** | | | | | | **-** | **25.000.000,00** | |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penghargaan Yang Diberikan* | - | | | 3 kali | 24.998.000,00 | | | - | - | - | - | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | | | | 6 Entitas | 24.998.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 10. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan*** | **-** | | | **90 %** | **117.741.000,00** | | | | | | **-** | **111.640.200,00** | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | *Persentase Pengaduan Pencemaran dan Sengketa Lingkungan Yang Ditindaklanjuti* | - | | | 100 % | 117.741.000,00 | | | - | - | - | - | 111.640.200,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | | | | 20 Pengaduan | 110.606.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 103.810.200,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota* | | | | 1 Perkara | 1.245.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 1.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota* | | | | 5 Perkara | 5.890.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 6.330.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 11. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | ***Prosentase sampah yang dikelola*** | **-** | | | **100 %** | **13.023.899.600,00** | | | | | | **-** | **17.097.000.000,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Jumlah Sampah Yang Dikelola (ton/th)* | - | | | 189471,5 ton | 13.023.899.600,00 | | | - | - | - | - | 17.097.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | | | | 40 Kelompok | 308.722.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 360.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada* | | | | 12 Dokumen | 49.896.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 65.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir* | | | | 5 Unit | 734.600.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup PP6 : PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP | - | | 1.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0009 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | | | | 25 Unit | 1.516.660.800,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 1.550.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0011 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota* | | | | 3 Dokumen | 120.962.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan* | | | | 45000 Ton | 1.763.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 4.500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali* | | | | 15 Ton | 24.428.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 25.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | | | | 25 Unit | 5.797.987.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 7.500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase luas layanan pengumpulan sampah* | | | | 50 Persentase | 143.110.400,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan* | | | | 60000 Ton | 36.000.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | P9 - Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup PP6 : PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP | - | | 1.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah* | | | | 1 Laporan | 63.171.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 70.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang terdaur ulang* | | | | 15 Ton | 68.455.200,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | | | | 35000 Ton | 2.396.906.000,00 | Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 2.600.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | **JUMLAH** | | | | | | | **50.086.625.848,00** | | | | | | | **46.202.979.200,00** | |

# BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Pada Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri melaksanakan peningkatan kualitas RTHKP Kawasan SLG, serta dekorasi kota guna mempercantik kawasan kota. Kegiatan-kegiatan rutin berupa pemeliharaan tetap dilaksanakan seperti tahun sebelumnya.

Untuk kegiatan pengelolaan sampah didorong partisipasi aktif masyarakat dengan program pegelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pengtingnya pengelolaan sampah.

Untuk pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan/usaha yang menghasilkan/berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan terus dilaksanakan dan akan lebih ditingkatkan. Pembinaan terhadap pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan limbah juga terus dilaksankan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri juga melaksanakan fungsi kehutanan dengan melaksanakan konservasi daerah rawan longsor dan daerah tangkapan air. Selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | BELANJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | **50.086.625.848,00** |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **50.086.625.848,00** |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | **50.086.625.848,00** |
| 1, | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah*** | **100%** | **11.114.326.848,00** |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dok. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun* | 12 Dokumen | 34.178.800,00 |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 3 Dokumen | 6.040.000,00 |
| | 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 1 Dokumen | 3.682.000,00 |
| | 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | 1 Dokumen | 2.625.000,00 |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 2 Laporan | 2.180.000,00 |
| | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 5 Laporan | 19.651.800,00 |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi keuangan* | 25 Dokumen | 9.292.796.848,00 |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 1008 Orang/bulan | 8.997.826.848,00 |
| | 2.11.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 12 Dokumen | 18.210.000,00 |
| | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | BELANJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 12 Dokumen | 269.040.000,00 |
| | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 1 Laporan | 3.080.000,00 |
| | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | 12 Laporan | 4.640.000,00 |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen Administrasi BMD* | 4 Dokumen | 1.315.000,00 |
| | 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 4 Laporan | 1.315.000,00 |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pegawai* | 1 Kegiatan | 22.700.000,00 |
| | 2.11.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | 44 Unit | 19.700.000,00 |
| | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 40 Orang | 3.000.000,00 |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah* | - | 262.521.200,00 |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 1 Paket | 1.187.200,00 |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 6 Paket | 67.825.100,00 |
| | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 2 Paket | 15.062.300,00 |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 12 Paket | 2.864.600,00 |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | BELANJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 13 Paket | 17.348.000,00 |
| | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | 12 Dokumen | 6.840.000,00 |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | 151.394.000,00 |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah BMD yang disediakan* | 4 unit | 266.462.000,00 |
| | 2.11.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | 2 Unit | 224.000.000,00 |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 1 Unit | 35.172.000,00 |
| | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 1 Unit | 7.290.000,00 |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah* | 38 Dokumen | 1.190.903.000,00 |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 4 Laporan | 3.200.000,00 |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 24 Laporan | 502.620.000,00 |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan | 685.083.000,00 |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD yang dipelihara* | 29 Unit | 43.450.000,00 |
| | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 5 Unit | 12.400.000,00 |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | BELANJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2.11.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | 4 Unit | 1.200.000,00 |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 20 Unit | 29.850.000,00 |
| 2, | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup*** | **83 %** | **489.886.000,00** |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Yang Disusun atau Direview* | 1 dokumen | 135.721.000,00 |
| | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota* | 1 Dokumen | 13.132.000,00 |
| | 2.11.02.2.01.0005 | Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH | | | |
| | | | *Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan* | 2 Dokumen | 122.589.000,00 |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen KLHS dan KRP Yang Disusun* | 0 dokumen | 354.165.000,00 |
| | 2.11.02.2.02.0004 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS | | | |
| | | | *Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi* | 2 Dokumen | 13.972.000,00 |
| | 2.11.02.2.02.0006 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun* | 1 Dokumen | 340.193.000,00 |
| 3, | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu*** | **79,76 %** | **2.353.756.000,00** |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Uji Kualitas Lingkungan (Air, Udara, dan Biomassa) Yang Tersusun* | 3 laporan | 1.850.498.800,00 |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | 2 Dokumen | 288.920.000,00 |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | 1 Dokumen | 15.860.000,00 |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | BELANJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2.11.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan* | 4 Kegiatan | 102.035.000,00 |
| | 2.11.03.2.01.0005 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | | | |
| | | | *Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK* | 1 Dokumen | 89.640.000,00 |
| | 2.11.03.2.01.0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | |
| | | | *Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)* | 19 Lokasi | 51.582.000,00 |
| | 2.11.03.2.01.0008 | Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | |
| | | | *Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim* | 1 Laporan | 236.990.000,00 |
| | 2.11.03.2.01.0009 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | | | |
| | | | *Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan* | 3 Unit | 5.280.000,00 |
| | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | |
| | | | *Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun* | 1 Dokumen | 95.280.000,00 |
| | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | |
| | | | *Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan* | 64 Paket | 275.636.000,00 |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | 15 Dokumen | 689.275.800,00 |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran* | 4 kali | 501.257.200,00 |
| | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan* | 4 Laporan | 501.257.200,00 |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran Yang Dilaksanakan* | 1 kegiatan | 2.000.000,00 |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | BELANJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2.11.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan* | 2 Dokumen | 2.000.000,00 |
| 4, | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | ***Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan*** | **0,050 %** | **22.305.800.000,00** |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Luas Taman/Jalur Hijau/Taman Kehati Yang Dikelola (ha)* | 19,2 % | 22.305.800.000,00 |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | 15 Ha | 13.900.000.000,00 |
| | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* | 300 Orang | 765.800.000,00 |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | 10 Unit | 7.200.000.000,00 |
| | 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | | |
| | | | *Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | 4 Unit | 440.000.000,00 |
| 5, | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | ***Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3*** | **324 usaha/kegiatan** | **59.338.400,00** |
| | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | *Jumlah Pengelola LB3 Yang Difasilitasi* | 50 usaha/kegiatan | 13.248.000,00 |
| | 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | 40 Dokumen | 6.624.000,00 |
| | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3* | 40 Laporan | 6.624.000,00 |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | BELANJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pengumpul LB3 Difasilitasi* | 20 usaha/kegiatan | 46.090.400,00 |
| | 2.11.05.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | 3 Dokumen | 6.288.000,00 |
| | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya* | 5 Dokumen | 5.460.000,00 |
| | 2.11.05.2.02.0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | | | |
| | | | *jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina* | 40 Usaha | 34.342.400,00 |
| 6, | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | ***Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina*** | **75 %** | **299.880.000,00** |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dibina dan/atau Diawasi* | 88 % | 299.880.000,00 |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | 50 Dokumen | 236.180.000,00 |
| | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | |
| | | | *Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya* | 2 Orang | 36.786.000,00 |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan | | | |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | 48 Badan Usaha | 26.914.000,00 |
| 7, | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | ***Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina*** | **70 %** | **60.061.600,00** |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | BELANJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | *Jumlah Kearifan Lokal Yang Diakui* | 0 kelompok | 50.000.000,00 |
| | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH* | 1 Dokumen | 50.000.000,00 |
| | 2.11.07.2.02 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | *Jumlah Kearifan Lokal Yang Dibina* | 7 kelompok | 10.061.600,00 |
| | 2.11.07.2.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan* | 1 Dokumen | 10.061.600,00 |
| 8, | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | ***Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH*** | **28,72 %** | **236.938.400,00** |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina* | 55 lembaga | 236.938.400,00 |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | |
| | | | *Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH* | 50 Lembaga | 236.938.400,00 |
| 9, | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | ***Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun*** | **3 kali** | **24.998.000,00** |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penghargaan Yang Diberikan* | 3 kali | 24.998.000,00 |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | 6 Entitas | 24.998.000,00 |
| 10, | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan*** | **90 %** | **117.741.000,00** |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | BELANJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | *Persentase Pengaduan Pencemaran dan Sengketa Lingkungan Yang Ditindaklanjuti* | 100 % | 117.741.000,00 |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | 20 Pengaduan | 110.606.000,00 |
| | 2.11.10.2.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | |
| | | | *Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota* | 1 Perkara | 1.245.000,00 |
| | 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | |
| | | | *Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota* | 5 Perkara | 5.890.000,00 |
| 11, | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | ***Prosentase sampah yang dikelola*** | **100 %** | **13.023.899.600,00** |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Jumlah Sampah Yang Dikelola (ton/th)* | 189471,5 ton | 13.023.899.600,00 |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | 40 Kelompok | 308.722.400,00 |
| | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada* | 12 Dokumen | 49.896.000,00 |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir* | 5 Unit | 734.600.000,00 |
| | 2.11.11.2.01.0009 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2025 | BELANJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | *Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | 25 Unit | 1.516.660.800,00 |
| | 2.11.11.2.01.0011 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | |
| | | | *Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota* | 3 Dokumen | 120.962.200,00 |
| | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan* | 45000 Ton | 1.763.000.000,00 |
| | 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali* | 15 Ton | 24.428.400,00 |
| | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | 25 Unit | 5.797.987.200,00 |
| | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | | | |
| | | | *Persentase luas layanan pengumpulan sampah* | 50 Persentase | 143.110.400,00 |
| | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan* | 60000 Ton | 36.000.000,00 |
| | 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah* | 1 Laporan | 63.171.000,00 |
| | 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang terdaur ulang* | 15 Ton | 68.455.200,00 |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | |
| | | | *jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | 35000 Ton | 2.396.906.000,00 |
| | **J U M L A H** | | | | **50.086.625.848,00** |

# BAB V

# P E N U T U P

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dengan menerapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Kerja ini selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Kab. Kediri. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Apabila dalam pelaksanaannya ada perubahan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rencana kerja ini disusun, semoga bermanfaat dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan.

Kediri, 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kediri

**Putut Agung Subekti**

**BUPATI KEDIRI**

**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**